



EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK

<https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>

Published by Pusat Studi Gender dan Anak LP2M
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Mewujudkan Pemerataan Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar di Kota Bandung

Teti Ratnawulan¹, Imam Asrofi^{2*}, Nur Ma'rifat³

¹ Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Nusantara, Bandung

² Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara, Bandung

³ Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Nusantara, Bandung

ABSTRAK: Belum maksimalnya pembangunan layanan pendidikan salah satunya adalah belum meratanya Kartu Indonesia Pintar yang tepat sasaran secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran tentang kebijakan terkait dengan program Kartu Indonesia Pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di SMP Negeri Kota Bandung yang dikaji berdasarkan sudut pandang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan faktor penghambat, serta solusi perbaikan kedepan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di SMP Negeri Kota Bandung telah dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, namun belum maksimal melakukan pemerataan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu sesuai tujuan diharapkan ditinjau dari masih terdapatnya siswa yang putus sekolah karena kekurangan biaya, sering terlambatnya pencairan dana, dan kurangnya kerjasama sekolah dan pemerintah melakukan pengelolaan dan pengendalian Kartu Indonesia Pintar.

Kata Kunci: Pemerataan; Pendidikan; Kartu Indonesia Pintar.

ABSTRACT: The development of educational services has not been maximized, one of which is that the Smart Indonesia Card has not been effectively and efficiently targeted. The purpose of the study was to describe and obtain an overview of the Smart Indonesia Card policy in realizing equitable education in public junior high schools in Bandung City which was studied based on planning, organizing, implementing, supervising, inhibiting factors, and future improvement solutions. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results showed that, the Smart Indonesia Card policy in realizing educational equity at the Bandung City Public Junior High School has been carried out through planning, organizing, implementing, and supervising, but has not maximally carried out educational equity in providing assistance to underprivileged students according to the expected goals in terms of there are still students who drop out of school due to lack of funds, frequent delays in disbursement of funds, and lack of cooperation between schools and the government in managing and controlling the Smart Indonesia Card.

Keywords: Equity; Education; Smart Indonesia Card.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional suatu negara ditandai dengan adanya pertumbuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan memiliki peran penting bagi kemajuan suatu wilayah (Dimmera & Purnasari, 2020). Dengan melakukan perbaikan dan penataan pendidikan yang baik secara berkelanjutan seiring perkembangan zaman diharapkan pendidikan yang bermutu bisa mencetak generasi bangsa yang unggul dan berkualitas. Mengingat pentingnya pendidikan maka sudah semestinya pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial (Siddik et al., 2022). Penyebab masyarakat kesulitan dalam mengakses pendidikan dikarenakan faktor kemiskinan (Nikmah et al., 2020). Kemiskinan dan pendidikan menurut Rohaeni (2018:193) adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Namun kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu persamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*). *Equality* atau persamaan mengandung arti kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan, *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. (Mujahidun, 2016: 43). Pemerataan pendidikan ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama tanpa membedakan status sosial. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan melalui kartu Indonesia Pintar perlu dikelola dengan baik mengingat pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara. Apabila kartu Indonesia Pintar dikelola dengan baik, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat yaitu mendorong mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka putus sekolah, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan masyarakat mandiri dan bisa bersaing dengan negara lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Murni 4 tahun terakhir Tahun 2016-2019 di Kota Bandung pada jenjang pendidikan tingkat SD Tahun 2016 sebesar 95.63%, Tahun 2017 sebesar 97.22%, tahun 2018 sebesar 98.88%, namun mengalami penurunan pada

tahun 2019 menjadi sebesar 98.73%. Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2016 sebesar 86.57% mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 83.53%, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 79.58%, tahun 2019 sebesar 80.00% mengalami sedikit peningkatan, namun tidak naik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sama halnya dengan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Tahun 2016 sebesar 70.37% mengalami penurunan di setiap tahunnya pada tahun 2017 sebesar 65.78%, pada tahun 2018 sebesar 67.34%, dan tahun 2019 sebesar 68.00%. (<https://jabar.bps.go.id/>, diakses 7 Agustus 2022).

Data di atas menjelaskan bahwa, selama empat tahun terakhir akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan di Kota Bandung masih mengalami keterlambatan terlihat dari adanya penurunan jumlah kelompok usia bersekolah dari jenjang SD, dan rawan melanjutkan pada jenjang pendidikan tingkat SMP maupun SMA. Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerataan pendidikan yaitu dengan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 bagi masyarakat yang kurang mampu serta dalam rangka untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun.

Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Dimmera (2020:308) diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan juga meningkatkan mutu pendidikan serta dapat menjamin peserta didik dari keluarga tidak mampu tetap bersekolah sehingga mampu melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Fungsi dari Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan dana sebesar Rp. 750.000 per tahun kepada siswa yang kurang mampu untuk kebutuhan buku, perlengkapan alat sekolah, biaya transportasi ke sekolah, pakaian/seragam sekolah, dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan siswa sekolah (Handayani, 2018). Namun dalam pelaksanaannya, penyaluran Kartu Indonesia Pintar belum merata dengan masih terdapat siswa putus sekolah di jenjang pendidikan SMPN Kota Bandung. Penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran mengakibatkan siswa dari keluarga ekonomi yang tidak mampu tidak bisa mendapatkan akses bantuan Kartu Indonesia Pintar (Siddik et al., 2022). Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami dan merasa kesulitan mendapatkan akses dari fasilitas program Kartu Indonesia Pintar.

Kartu Indonesia Pintar dapat membantu masyarakat atau mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah karena kesulitan ekonomi serta tujuan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dapat tercapai, khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Adanya pemerataan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar,

tentunya perlu dikelola dengan baik oleh sekolah karena dapat membantu sekolah berkaitan dengan peserta didiknya yang kurang mampu. Bantuan Kartu Indonesia Pintar harus dapat tersalurkan kepada sasaran yang tepat melalui manajemen pengelolaan yang baik di sekolah. Manajemen menurut G.R Terry (Pananrangi, 2017), 'merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya'.

Kartu Indonesia Pintar dalam hal ini adalah bagaimana mengatur dan mengelola Kartu Indonesia Pintar agar tepat sasaran secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan pemerataan pendidikan, melakukan kerjasama dengan semua pihak internal sekolah maupun eksternal sekolah, dan dikelola melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan supaya kebijakan kartu indonesia pintar bisa terdistribusikan secara tepat yaitu kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan secara utuh dan mendalam mengenai manajemen kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri Kota Bandung. Penelitian Kualitatif menurut Sukmadinata (2005) bahwa, penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian yaitu informan yang dapat memberikan informasi akurat dan dapat dipercaya yaitu kepala sekolah, guru, operator KIP, orang tua siswa, dan siswa SMP Negeri Kota Bandung. Tahap akhir dalam mendeskripsikan dan menarik kesimpulan hasil penelitian sebagaimana menurut Sugiyono (2013) yaitu melalui tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Perencanaan atau *planning* merupakan bagian dari tahapan pertama dalam manajemen mencakup aktivitas perumusan dan penetapan langkah dan tujuan, mengintegrasikan sumber daya, menyusun strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan menurut Terry (1993) dikutip Sukarna (2011), merupakan tindakan memilih, menghubungkan fakta-fakta, membuat asumsi-asumsi kedepan dengan merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri Kota Bandung dirumuskan secara bersama-sama dengan melibatkan pihak internal dan eksternal sekolah yaitu pihak sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah. Perencanaan disusun untuk mempermudah mengarahkan aktivitas penyaluran dana KIP agar bisa sampai ke penerima manfaat, dan mekanisme pengajuan KIP bagi para orang tua siswa yang kurang melek terhadap teknologi agar mudah untuk mengakses KIP. Perencanaan KIP di SMP Negeri Kota Bandung melibatkan operator sekolah karena berhubungan juga dengan pelaporan akademik. Dalam perencanaan KIP, sekolah menetapkan prosedur, yaitu adanya pengajuan, proses seleksi, penerbitan SK nominasi, melakukan aktivasi, terbit SK pemberian, dan sampai siswa mendapatkan pencairan dana.

Perencanaan kebijakan KIP di SMP Negeri Kota Bandung melibatkan operator sekolah masing-masing yang bertugas untuk membantu mengelola, meninjau, dan menyalurkan dana Kartu Indonesia Pintar. Mekanisme untuk pengusulan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar melalui tahapan mengentri dan mutakhirkan data siswa pemilik Kartu Indonesia Pintar ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap sesuai Nama Siswa, Tempat lahir, Tanggal lahir, Nama ibu kandung, Nomor Kartu Indonesia Pintar. Adapun siswa yang belum terdaftar di aplikasi dapodik maka diarahkan untuk mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW setempat kemudian di serahkan kepada pihak sekolah yang akan membantu proses pengajuan KIP.

2. Pengorganisasian Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Pengorganisasian merupakan suatu tindakan pengelompokkan dan adanya hubungan yang efektif antar bidang dan orang-orang dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Pengorganisasian menurut Terry (dikutip Sukarna, 2011), adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang yang diperlukan sesuai bidang dan keahlian, menyediakan sarana prasarana yang sesuai, dan mendelegasikan wewenang untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Pengorganisasian kebijakan kartu indonesia pintar di sekolah berhubungan dengan pembagian tugas dan wewenang dalam mengelola bantuan dana pendidikan dari pemerintah bagi ekonomi

siswa yang kurang mampu, membagi tugas antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, dan pengorganisasian dilakukan satu arah dan satu tujuan dari pemerintah pusat sampai ke masyarakat supaya adanya pemerataan manfaat dari kartu indonesia pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

Pengorganisasian Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri Kota Bandung yang dimulai dari pendataan pelaporan penerima kebijakan bantuan kartu indonesia pintar, Kepala sekolah memberikan tugas kepada operator sekolah dan Tim khusus Pengelola Kartu Indonesia Pintar untuk mengelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Operator KIP bertugas memverifikasi dan memvalidasi data siswa yang menerima bantuan KIP berdasarkan kepemilikan kartu pendamping sosial PKH/KIS/KPS, disesuaikan dengan data siswa yang sudah terdaftar di aplikasi si pintar, mengkomunikasikan dengan pihak orangtua siswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar, mensosialisaikan tentang manfaat dana Kartu Indonesia Pintar bagi siswa, dan siswa yang berhak mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar, dan kemudian untuk diarahkan ke bagian Tata Usaha serta prosedur mengurus Surat Keterangan Pengambilan Dana Kartu Indonesia Pintar kepada pihak Bank. Buku tabungan KIP para siswa sebagai bukti mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dikelola oleh operator sekolah untuk bahan laporan sekolah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Pelaksanaan merupakan tindakan nyata sebagai bentuk implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan Menurut Terry (dikutip Sukarna, 2011) adalah mengatur atau memotivasi semua anggota agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas sesuai perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar dimana orang-orang yang ditugaskan sesuai bidang masing-masing, melakukan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh agar bantuan pendidikan KIP dapat tersalurkan, semua siswa yang kurang mampu dapat terlayani sesuai tujuan dalam perencanaan dan pengorganisasian, dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi sekolah, orang tua siswa, siswa dan juga pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan melalui bantuan dana pendidikan yaitu KIP.

Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri Kota Bandung, sekolah melakukan sosialisasi melalui pertemuan formal dengan para orang tua siswa, terutama para orang tua siswa yang berpenghasilan ekonomi rendah agar mendapatkan bantuan

dana pendidikan, mensosialisasikan prosedur dan syarat ketentuan pengajuan dan penerimaan dana bantuan KIP. Operator sekolah melakukan *entri* data siswa yang telah memenuhi syarat data siswa untuk diajukan kepada pemerintah sebagai siswa yang layak mendapatkan bantuan dana KIP

Pelaksanaan KIP di SMP Negeri Kota Bandung dalam prosesnya bukan hanya menghantarkan para siswa melakukan pendaftaran bantuan KIP, namun dilakukan secara berkelanjutan pada proses pencairan dana. SMP Negeri di Kota Bandung membangun komunikasi dan koordinasi dengan para orang tua siswa terkait proses sampai pencairan dana Kartu Indonesia Pintar, proses pengambilan dana pendidikan melalui Bank Rakyat Indonesia. Setelah pencairan dana Kartu Indonesia Pintar, photocopy buku tabungan para siswa sebagai bukti pengambilan Kartu Indonesia Pintar diserahkan kepada operator sekolah untuk melakukan rekap data pencairan dan pelaporan.

Bantuan dana pendidikan pemerintah melalui KIP di SMP Negeri Kota Bandung pada umumnya mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa senang dan terbantu dengan adanya bantuan dana Kartu Indonesia Pintar, namun terdapat pula respon negatif dari masyarakat yang merasa bahwa pemberian bantuan dana Kartu Indonesia Pintar belum merata dan belum tepat sasaran.

4. Pengawasan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Pengawasan merupakan pengendalian dari kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan efektif dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengawasan menurut Terry (dalam Sukarna, 2011), merupakan proses menentukan apa yang harus dicapai, standar yang sedang dicapai berdasarkan kinerja, evaluasi kerja, dan bila perlu melakukan tindakan korektif agar kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pada Kartu Indonesia Pintar agar pengajuan dan penerimaan bantuan dana KIP dapat berjalan sesuai yang diharapkan, semua informasi tentang kebijakan KIP dan akses atau pemanfaatannya KIP dapat tersalurkan kepada masyarakat yang tepat sesuai mekanisme bantuan dana yang telah ditetapkan, pemeriksaan hasil pekerjaan dan mengambil tindakan korektif terhadap hasil pekerjaan jika diperlukan.

Pengawasan kebijakan KIP di SMP Negeri Kota Bandung bagi siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar juga berkaitan dengan masalah prestasi akademik siswa, sekolah memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi belajar, semangat belajar dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. kerjasama sekolah di SMP Negeri

Kota Bandung dengan para siswa terkait pengawasan dan evaluasi pada umumnya berjalan dengan baik. Pihak sekolah selalu memberikan motivasi, pembinaan, dan perhatian kepada siswa supaya semangat bersekolah. Pihak sekolah terkadang melakukan kunjungan langsung ke rumah tinggal siswa penerima Kartu Indonesia Pintar.

Pengawasan terkait kebijakan kartu indonesia pintar berfungsi untuk kontrol organisasi di lingkungan sekolah agar selalu mengendalikan supaya ada keberhasilan sesuai tujuan bantuan pendidikan, mengawasi faktor pendukung dan penghambat manajemen kebijakan kartu indonesia pintar, dampak dari pelaksanaan kebijakan kartu indonesia pintar agar tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan. Pengawasan diperlukan supaya mengetahui hasil dari manajemen kebijakan kartu indonesia pintar, dan mengevaluasi sistem kinerja pengelolaan kartu indonesia pintar di SMP Negeri Kota Bandung. Pengawasan Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri Kota Bandung bukan hanya proses pengajuan dan penerimaan dana, namun memberikan motivasi secara intensif kepada siswa penerima KIP agar semangat dalam belajar, tidak bolos sekolah, dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

5. Faktor Penghambat Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Faktor yang menghambat Kebijakan kartu indonesia pintar saat ini tidak adanya evaluasi pemutakhiran data terkait penerima Kartu Indonesia Pintar, pihak sekolah tidak mengetahui aksesnya dan tidak diberi kewenangan untuk merubah data penerima Kartu Indonesia Pintar karena langsung terhubung ke link kementerian sosial dan sudah terdaftar di sistem aplikasi Sipintar sehingga menyebabkan terdapat siswa yang dikategorikan layak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar namun tidak termasuk dalam data nominasi penerima Kartu Indonesia Pintar. Pihak sekolah kesulitan dalam mengumpulkan bukti pengambilan dana, kebanyakan orangtua siswa lupa tidak melampirkan bukti pengambilan dana KIP sehingga sekolah terkadang tidak melaporkan penggunaan tersebut. Sekolah tidak dapat mengawasi pemanfaatan dana oleh para orang tua siswa karena tidak adanya bukti kwitansi pelaporan dana. Laporan yang diajukan ke pihak dinas terkait hanya bukti pengambilan dana. Kesalahan sistem menimbulkan siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar, terdata di DTKS, memiliki syarat kartu pendamping, kriteria layak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, tetapi

tidak masuk SK Nominasi dari Kartu Indonesia Pintar menyebabkan tidak ada pencairan dana Kartu Indonesia Pintar.

Faktor penghambat kebijakan kartu indonesia pintar dalam implementasinya di SMP Negeri Kota Bandung secara umum yaitu: a) Kurang sinkronnya data Dapodik dengan data kementerian sosial mengakibatkan adanya keterlambatan pencairan dana Kartu Indonesia Pintar, b) Kurangnya pengawasan penyaluran KIP menyebabkan terdapat beberapa kejadian yang tidak tepat sasaran KIP, c) kurangnya keterlibatan pengawasan dari masyarakat agar penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar mampu mewujudkan pemerataan pendidikan secara berkelanjutan, dan d) keterbatasan orangtua siswa dalam mengakses media internet

6. Solusi Perbaikan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Upaya perbaikan sebagai solusi ke depan dari permasalahan yang terjadi untuk kesulitan pengumpulan bukti pengambilan dana yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dokumen pelaporan dengan cara mengingatkan orangtua sebelum adanya pengambilan dana Kartu Indonesia Pintar, dan pemberitahuan melalui *message* sehingga laporan pengambilan dana Kartu Indonesia Pintar bisa segera terkumpul. Mengatasi siswa yang putus sekolah, pihak sekolah sering melakukan peninjauan langsung ke rumah tempat tinggal siswa, melihat kondisi para orang tua siswa dan apabila layak mendapatkan bantuan dana maka memberikan rekomendasi untuk pengajuan penerima Kartu Indonesia Pintar. Meningkatkan pertemuan dengan para orang tua siswa dalam rangka melakukan sosialisasi secara rutin terkait kebijakan Kartu Indonesia Pintar dan penyebarluasan informasi bagi keluarga yang tidak mampu supaya bisa mengakses bantuan dana pendidikan. Bagi para orang tua yang kesulitan mengakses KIP diberikan pengarahan dari sekolah dan bantuan oleh operator dalam pengajuan, pengambilan Kartu Indonesia Pintar.

D. SIMPULAN

Manajemen kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di SMP Negeri Kota Bandung telah dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, namun belum maksimal melakukan pemerataan pendidikan memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu sesuai tujuan diharapkan karena masih terdapatnya siswa yang putus sekolah karena kekurangan biaya, faktor penghambat diantaranya sering terlambatnya pencairan dana, dan kurangnya

kerjasama sekolah dan pemerintah melakukan pengelolaan dan pengendalian Kartu Indonesia Pintar.

Pemerintah hendaknya memberikan kewenangan kepada sekolah untuk turut berperan aktif dalam mengambil keputusan, mengakomodir penerima Kartu Indonesia Pintar agar tepat sasaran, dan pihak sekolah dapat melakukan pengawasan secara intensif kepada penerima Kartu Indonesia Pintar agar bantuan tidak disalah gunakan, meningkatkan komunikasi dengan para orang tua siswa, serta bantuan dana tersebut dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2020). *Tabel Indeks Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bandung Tahun 2016-2019*. <https://jabar.bps.go.id>. (diakses tanggal 07 Agustus 2020)
- _____. (2020). *Kota Bandung dalam Angka 2019-2022* <https://bandungkota.bps.go.id> (diakses tanggal 07 Agustus 2020)
- _____. (2020). *Kota Bandung dalam Angka 2019-2020* <https://bandungkota.bps.go.id> (diakses tanggal 07 Agustus 2020)
- Dimmera, B.E., & Purnasari, E. (2020). Permasalahan dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Sebatik Vol. 24 No. 2 (2020)*, 307-314.
- Handayani, C. (2018). *Implementasi Metode Promethee untuk Menentukan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Sekolah Menengah Kejuruan*.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.
- Mujahidun. (2016). Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Jurnal Tarbiyatuna, Vol 7 No 1 (2016)*, 38-52.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? *Jurnal Komunikasi Pendidikan, 4(2)*, 72. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581>.
- Pananrangi., & Rasyid, Andi. (2017). Manajemen Pendidikan. *Ebook Perpustakaan Nasional: Celebes Media Perkasa*: <https://books.google.co.id/>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan.

Journal of Education Management and Administration Review, 2 (1), 193-204.

- Siddik, F., Agnes Yohana Silalahi, Indri E Y Napitupulu, Zahwa Alya Azzahra Nst, Putri Nurul Afifah Bangun, Hannah Selly Melinda Sagala, & Franklin Asido Rossevelt. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar (Sd) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kota Medan. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora*, 1 (1), 43-52. <https://doi.org/10.55904/histeria.v1i1.120>
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta (Cetakan Ke-19)
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju
- Sukmadinata, Nana Sy. (2005). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT Rosda Karya
- Suparman, Endang. (2020). *Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Kabupaten Tasikmalaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim. Tasikmalaya.